

ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN PADA PELATIHAN TEKNIS STATISTIK SEKTORAL PEMBINA 100 DESA CINTA STATISTIK (CANTIK)

TRAINING NEEDS ANALYSIS IN THE TECHNICAL TRAINING OF SECTORAL STATISTICS BUILDING OF 100 STATISTIC LOVE VILLAGES

Arezia Magdalyn
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
Jl. Raya Jagakarsa 70, Lenteng Agung, Jakarta 12620
email: arezia.magdalyn@gmail.com

(Diterima 6 Juni 2021, Direvisi 17 November 2021, Disetujui 29 November 2021)

Abstrak

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan bagian awal dari suatu perencanaan program pelatihan pembina 100 desa cantik dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang dimiliki saat ini dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh aparat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jenis pelatihan beserta desain kurikulum pelatihan yang sesuai dan tepat sasaran bagi pembina aparat desa. Metode analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui kajian studi literatur dan Focus Group Discussion (FGD). Penulis menyusun kondisi bisnis tiga sampel desa (Maduretno, Andongsili, Lipursari) dan penyebab kesenjangan kompetensi aparat desa berdasarkan hasil FGD yang dilaksanakan pada tahap awal perencanaan suatu program pelatihan. Hasil dari kajian ini adalah jenis pelatihan yang dibutuhkan beserta dengan kurikulum pelatihan yang dapat dilaksanakan dalam menutup kesenjangan (gap) yang ada. Program pelatihan yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan melaksanakan pengelompokan materi pelatihan yang dibagi menjadi dua tahap agar pelatihan calon pembina 100 Desa Cantik lebih fokus, terarah, tepat sasaran serta dilakukan secara efektif dan efisien. Tahap pertama pelatihan difokuskan pada materi pelatihan yang berkaitan dengan teknik komunikasi, sedangkan tahap kedua lebih fokus kepada materi pelatihan terkait dengan tata kelola desa cantik.

Kata kunci: Analisis Kebutuhan pelatihan, Kondisi Bisnis, Penyebab Kesenjangan, desa cinta statistik

Abstract

Training needs analysis is the initial part of planning a training program for the coaches of 100 statistical love villages in identifying competency gaps that currently exist with the competencies that village officials should have. The purpose of this research is to determine the type of training along with the design of the appropriate and targeted training curriculum for village officials. This analysis method uses a qualitative approach, namely through a literature study and Focus Group Discussion (FGD). The author compiled the business conditions of three sample villages (Maduretno, Andongsili, Lipursari) and the causes of the competency gaps of village officials based on the results of FGDs carried out in the early stages of planning a training program. The result of this study is the type of training needed along with the training curriculum that can be implemented in closing the existing gap. The required training program can be carried out by grouping the training materials into two stages so that the training for the prospective supervisors of 100 statistical love villages is more focused, directed, on target and carried out effectively and efficiently. The first phase of the training focused on training materials related to communication techniques, while the second phase focused more on training materials related to statistical love villages governance

Keywords: *Training Need Analysis, The State of The Business, Gap Causes, Statistic Love Villages*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral melalui Pusdiklat memiliki peran dalam pembinaan statistik sektoral termasuk di tingkat Desa. Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 1997 tentang Statistik, BPS melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat dalam melakukan pembinaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan statistik agar dapat meningkatkan kontribusi serta apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan berperan dalam pembangunan nasional (UU Statistik, 1997).

Salah satu upaya yang dilakukan BPS yaitu dengan menyusun program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), yang sejalan dengan tujuan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), disebutkan bahwa pengaturan SDI bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data baik yang dihasilkan oleh Instansi Pusat maupun Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain dari untuk mengatur tata kelola data, pengaturan SDI juga memiliki tujuan dalam ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses (Perpres SDI, 2019).

Desa Cinta Statistik (Cantik) juga merupakan bagian dari salah satu *Quick Win* BPS sebagai pembina statistik sektoral. Dalam rangka mendukung program Desa Cantik, BPS melalui Pusdiklat menyelenggarakan pelatihan bagi calon pembina 100 Desa Cantik di tahun 2021. Perihal tersebut sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS periode 2020 sampai dengan 2024 yang menyebutkan bahwa sasaran strategis dari tujuan pusdiklat BPS adalah terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia (Renstra Pusdiklat BPS, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan analisis ini, yaitu masih rendahnya kapasitas desa dalam melakukan perannya pada pengelolaan dan pemanfaatan data. Perihal tersebut berkaitan dengan tingkat level pendidikan aparatur desa, dimana lebih dari 60% aparatur desa di Indonesia hanya lulusan SMA, sekitar 19% berpendidikan sarjana dan lebih dari 21% aparatur desa tidak lulus pendidikan formal/ tidak ikut pendidikan formal/hanya lulusan SD dan SMP (Nursalikah, 2019). Selain itu, berdasarkan data yang ada tingkat pendidikan para kepala desa di seluruh Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Untuk jenjang pendidikan doktoral (S3) sebanyak 0.01%, jenjang magister (S2) sebanyak 0.5%, sarjana (S1) 15%, SMA 62%, SMP 16% serta sebanyak 4% adalah lulusan SD (Amelia Rahma, 2021). Terlihat bahwa latar belakang pendidikan kepala desa di seluruh Indonesia didominasi oleh lulusan SMA dan SMP. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perilaku dan pola hidup seseorang terutama dalam memotivasi seseorang dalam melakukan perannya (Budiarti, Anjaya dan Girsang, 2021)

Latar belakang pendidikan menjadi isu utama pentingnya pelatihan terhadap para aparatur desa melalui para pembina desa cinta statistik. Pelatihan merupakan bagian utama dari suatu kegiatan manajemen pada Sumber Daya Manusia (SDM), pelatihan harus dilakukan karena lebih dipusatkan kepada peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan pekerjaan yang lebih spesifik (Budiarti, Anjaya and Girsang, 2021). Aspek pelatihan juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja dari aparat pemerintah desa yang merupakan bagian dari kompetensi kerja (Ulumudin, 2021). Selain itu, Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan dalam memperbaiki kemampuan kerja dan membantu dalam memahami suatu pengetahuan yang praktis dan menerapkannya (Perka BKN AKD, 2011). Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan bagi calon pembina 100 Desa Cantik menjadi sangat penting dilakukan

Pusdiklat BPS di tahun 2021 ini. Melalui pelatihan ini diharapkan para calon pembina Desa Cantik dapat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur desa di wilayah desa/kelurahan binaannya.

Pada tahap awal perencanaan program pelatihan calon pembina 100 Desa Cantik diperlukan kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2011, Analisis Kebutuhan Pelatihan merupakan bagian awal dari tahapan perencanaan program pelatihan yang dibutuhkan dalam menghubungkan kesenjangan antara kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan jabatannya (Perka BKN AKD, 2011). Perencanaan diawali dengan tahapan identifikasi kebutuhan dalam suatu program pelatihan dan dalam program pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) pada suatu organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi SDM.

Selain itu, AKP juga merupakan langkah awal pada suatu proses siklus pelatihan yang berperan dalam strategi pelatihan di suatu organisasi maupun kelompok profesional, siklus AKP diawali dengan konsultasi sistematis dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang perlu dipertimbangkan, diikuti dengan perencanaan pelatihan, penyampaian materi dan evaluasi (Gould et al., 2004). AKP merupakan komponen penting dari sistem pembelajaran karena keberhasilan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan di lingkungan organisasi bergantung pada kualitas informasi yang dihasilkan dalam tahapan AKP (Ferreira, Abbad dan Mourão, 2014).

Tujuan dari AKP adalah untuk menentukan jenis pelatihan beserta desain kurikulum pelatihan yang sesuai dan tepat sasaran, dalam hal ini dipastikan bahwa pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan solusi dari suatu masalah. Penilaian pada kebutuhan pelatihan sangat penting untuk dilakukan karena dapat menyediakan informasi yang berkaitan

dengan tingkat keahlian atau kemampuan dan pengetahuan pada sumber daya manusia pada suatu organisasi, sehingga pelatihan yang diselenggarakan dapat lebih difokuskan kepada pengisian kesenjangan yang terjadi (Wulandari, 2005). AKP juga merupakan mekanisme yang dapat digunakan dalam suatu organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu, proses yang tepat dalam menganalisis kebutuhan pelatihan dapat meningkatkan kemajuan pada suatu organisasi serta memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

1. Pelatihan

Pelatihan merupakan serangkaian dari kegiatan yang dirancang dalam rangka meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman maupun perubahan sikap pada seseorang. Pelatihan juga merupakan cara dalam menghilangkan atau memperkecil kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi riil yang saat ini terjadi. Pelatihan dilakukan untuk pemenuhan suatu jenis dan level kompetensi maupun kompetensi pada bidang tertentu, dengan adanya pelatihan diharapkan pengetahuan, keterampilan, kinerja dan perilaku individu, kelompok maupun organisasi dapat terus meningkat (Santoso, 2010).

Secara struktural pelatihan merupakan bagian dari sub sistem dari suatu sistem organisasi, fungsi dari program pelatihan adalah dapat memberikan konsep *the right skills at the right time* pada suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Penyusunan pada program pelatihan merupakan suatu kegiatan yang terstruktur dan harus dapat memberikan kontribusi pada nilai tambah suatu organisasi, serta diharapkan dapat mengatasi permasalahan tertentu yang

ada dalam mencapai suatu tujuan (Kurniadi dan Irianto, 2007).

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS sebagai penyelenggara pelatihan bagi calon pembina 100 Desa Cantik di tahun 2021, harus dapat mendesain dan mengembangkan program pelatihan yang sejalan dengan visi dan misi dari Pusdiklat BPS. Visi dari Pusdiklat BPS yaitu sebagai pusat pengembangan kompetensi SDM yang unggul dan adaptif. Sedangkan, misi dari Pusdiklat BPS yaitu mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan BPS *Corporate University*, mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM yang relevan dengan kebutuhan terkini, serta mengelola dan mengembangkan layanan pendidikan dan pelatihan serta sarana prasarana yang modern dan akuntabel (Renstra Pusdiklat BPS, 2021)

2. Analisis Kebutuhan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan harus berdasarkan pada kebutuhan yang sangat berkaitan erat dengan kebutuhan pembelajaran, kebutuhan tersebut dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kemampuan kompetensi yang telah dimiliki dengan kemampuan kompetensi yang seharusnya dimiliki (Kamil, 2003). Dalam Perka BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Manajemen PNS disebutkan bahwa penentuan diklat teknis dapat dilihat dengan proses identifikasi kesenjangan kompetensi yang akan dikembangkan (Perka BKN AKD, 2011). Selain itu, Analisis Kebutuhan Diklat merupakan proses perbandingan antara kemampuan kompetensi yang diharapkan dengan kemampuan kompetensi yang dimiliki saat ini atau disebut juga dengan proses identifikasi kesenjangan kemampuan kompetensi.

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan bagian penting pada tahap awal perencanaan program pelatihan,

AKP berfungsi sebagai fundamen informasi bagi pengelola SDM dalam menetapkan program pelatihan dengan segala formatnya (Kurniadi and Irianto, 2007). Hasil dari AKP memudahkan penyelenggara atau pengelola pelatihan dalam menentukan program pelatihan yang dibutuhkan oleh unit kerja pengguna pelatihan, proses pada identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan suatu proses yang mutlak harus dilakukan (Ngindana dan Hermawan, 2019). Manfaat dari adanya AKP adalah sebagai penyedia informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan program pelatihan yang diinginkan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

Metode Analisis

Untuk memperoleh profil desa dan kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan narasumber aparat Desa dari tiga Desa terpilih yaitu Desa Maduretno, Kelurahan Andongsili, dan Desa Lipursari. Pemilihan desa tersebut sebagai narasumber dikarenakan tiga desa tersebut merupakan *benchmark* desa yang ada di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pembinaan statistik sektoral kepada aparatur desa telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 Melalui Program “Desa Cinta Statistik”, dengan dimotori oleh Integrasi Agen Perubahan, Birokrasi dan Statistisi (ABS).

Fokus program Desa Cinta Statistik oleh BPS Kabupaten Wonosobo adalah optimalisasi pada Sistem Informasi Desa yang berbasis masyarakat, sehingga desa dapat menyusun dan menghasilkan data yang bersifat *mikro* dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa dapat dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran. Pada pelaksanaannya diawali dengan koordinasi dan konsolidasi BPS Kabupaten Wonosobo dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Pengelolaan Statistik dan Desa yaitu Dinas

Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos Permasdes), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Program Desa Cantik BPS Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sektoral kepada aparatur desa yang terbagi menjadi Bimtek yang berkaitan dengan Pentingnya Direktori Data Desa, Pelatihan Petugas Pengumpulan Data, Evaluasi Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Data Statistik, serta Pembuatan Publikasi Statistik Desa. Melalui program ini diharapkan nantinya terdapat publikasi maupun sistem informasi yang dapat menjelaskan secara lebih detail kondisi yang ada di setiap desa yang sesuai dengan kondisi terakhir (*update*), sehingga Sistem Informasi Desa berbasis masyarakat yang dihasilkan dapat dioptimalkan secara maksimal (Rahmat, 2020).

Metode FGD digunakan dalam memperoleh profil desa dan kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, metode ini dilakukan karena lebih efektif dalam mendorong percakapan yang lebih mengarah kepada mekanisme umpan balik dan memacu percakapan yang lebih lanjut. FGD digunakan dalam penelitian awal karena dapat memanfaatkan kekuatan dinamika kelompok dalam mendorong percakapan yang lebih spesifik dan umpan balik. Manfaat dari FGD dapat dimaksimalkan dengan perhatian lebih terhadap permasalahan dari desain suatu penelitian, metode ini memungkinkan untuk memberikan lebih banyak keterlibatan yang fokus kepada responden (Morgan, 2003)

Analisis ini juga menggunakan kajian studi literatur pada Perka BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Manajemen PNS. Perka BKN Nomor 17 Tahun 2021 disusun dalam rangka penguatan Lembaga Penyelenggara Diklat serta pengembangan

program Diklat Teknis Manajemen PNS. Tujuan dan Manfaat dari dilakukannya Analisis Diklat yang tercantum pada Perka tersebut adalah sebagai dasar penyusunan program Diklat Teknis dan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi.

Selain itu, agar program pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang seharusnya. Kajian dilakukan untuk memperoleh kesenjangan antara kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan jabatan aparat desa (Perka BKN AKD, 2011). Hasil dari identifikasi kesenjangan kompetensi (*gap*) diselaraskan dengan strategi dari suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelatihan (Manna, Singh and Sharma, 2016). Dengan demikian dapat diperoleh jenis pelatihan dan kurikulum pelatihan yang dibutuhkan dalam menutup kesenjangan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Desa

a. Desa Maduretno

Desa Maduretno berada di wilayah kecamatan Kalikajar dengan luas sebesar 9 Km² dan berada di lereng sebelah Barat Gunung Sumbing. Desa Maduretno memiliki 5 dusun yang terdiri dari dusun Larangan, Kebon dalem, Madusari, Ngabean dan Tempelsari. Penduduk di Desa Maduretno bersikap heterogen, meskipun berada di daerah pedesaan namun tidak semua mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian. Sebagai contoh di dusun Tempelsari yang memiliki lokasi yang berdekatan dengan pasar kertek, hampir sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang industri pengolahan tahu dan tempe. Sedangkan, jumlah penduduk Desa Maduretno terbagi atas laki-laki sebanyak 2953 jiwa dan perempuan sebanyak 2765 jiwa. Sedangkan, aparat pemerintah yang berada di desa maduretno terdiri dari

14 perangkat desa, 1 kepala desa dan 3 karyawan diluar perangkat desa.

Desa Maduretno mengikuti program Desa Cinta Statistik dilatarbelakangi oleh desa yang belum mempunyai data yang valid dan independen di bidang data kependudukan, data kemiskinan, data pendidikan, data kesehatan, data kesejahteraan masyarakat, dan data perekonomian masyarakat. Selain itu, Desa Maduretno juga memiliki motivasi dalam mencapai satu data desa yang independen, valid dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai salah satu bentuk upaya dari pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan desa agar terlaksananya pembangunan desa yang menyeluruh.

b. Kelurahan Andongsili

Kelurahan Andongsili telah memiliki jaringan internet yang cukup bagus, dan memiliki fasilitas komputer maupun laptop yang memadai. Akan tetapi, SDM yang dapat mengelola data desa belum ada dan belum memiliki aplikasi yang dapat mengolah data dengan baik. Perangkat SDM di pemerintahan kelurahan Andongsili terdiri dari 2 orang Aparatur Sipil Negara, 3 orang Pekerja Harian Lepas (PHL), dan 5 orang mantan perangkat desa. Latar belakang dari mengikuti program Desa Cantik adalah karena tidak tersedianya data profil kelurahan serta data dasar penduduk kelurahan Andongsili.

Dengan mengikuti program desa cantik diharapkan perencanaan pembangunan pada kelurahan Andongsili dapat dilakukan dengan baik, tata kelola data administrasi pemerintahan kelurahan yang memadai, dapat mengevaluasi laju pertumbuhan penduduk, dan dapat membantu dalam menentukan dengan cepat serta tepat sasaran dalam mengelola dana bantuan. Selain itu, aparat setempat masih

perlu pemahaman dalam konsep dan definisi pengelolaan statistik data di kelurahan Andongsili.

c. Desa Lipursari

Aparatur desa di Desa Lipursari hanya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur keuangan), kaur umum dan perencanaan, kepala seksi (kasi) pelayanan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pemerintah, kepala dusun (kadus) I, kadus II, kadus III, admin I dan II. Sumber daya teknologi informasi di desa Lipursari mencakup papan infografis, aplikasi *excel*, komputer, laptop dan jaringan internet yang baik. Selain itu, informasi berkaitan dengan Desa Lipursari juga tersedia dalam *platform* media informasi berupa *facebook*, *instagram* dan *web*. Motivasi desa dalam mengikuti desa cantik adalah dalam rangka mewujudkan data yang tepat, valid, dan satu data. Selain itu, diharapkan juga terlaksananya pengendalian pembangunan desa melalui data yang akurat serta terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan desa. Aparat desa Lipursari menyadari bahwa data itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan desa.

2. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil FGD dengan aparat desa dalam memperoleh profil desa dan kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, dapat disimpulkan gambaran kondisi desa Maduretno, kelurahan Andongsili, dan desa Lipursari sebagai berikut ini:

1. The State of The Business Desa Maduretno

No	Permasalahan	Kondisi Ideal	Kompetensi yang dimiliki saat ini	Kompetensi yang harus dimiliki
1	Data yang tidak valid dan independen	Terciptanya satu data desa yang independen dan valid	Petugas lapangan masih belum menguasai teknik <i>probing</i> yang baik Belum memahami tata kelola data yang baik	Petugas lapangan menguasai teknik <i>probing</i> yang baik Memahami tata kelola data yang baik
2	Perbedaan hasil data dari berbagai sumber yang berbeda	Hasil data yang sama dari berbagai sumber data	Petugas lapangan masih memiliki pemahaman konsep dan definisi yang berbeda	Petugas lapangan masih memahami konsep dan definisi dengan baik
3	Belum terdapat peta kondisi masyarakat desa	Terdapat peta kondisi masyarakat desa	Perangkat desa belum dapat melakukan analisis sederhana dari hasil data yang diperoleh	Perangkat desa dapat memetakan kondisi masyarakat desa
4	Pelayanan kepada masyarakat yang belum mudah	Pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan akurat	Perangkat desa belum memahami cara menyajikan data (tabulasi sederhana) yang memudahkan dalam pelayanan masyarakat	Perangkat desa memahami cara menyajikan data (tabulasi sederhana) yang memudahkan dalam pelayanan masyarakat
5	Belum dapat melaksanakan prioritas-prioritas penggunaan dana desa dengan baik dalam pengentasan kemiskinan	Dapat melaksanakan prioritas-prioritas penggunaan dana desa dengan baik dalam pengentasan kemiskinan	Perangkat desa belum memahami indikator-indikator strategis yang dibutuhkan dalam mengukur kemiskinan	Perangkat desa memahami indikator-indikator strategis yang dibutuhkan dalam mengukur kemiskinan
6	Belum dapat mengangkat potensi lokal desa	Dapat mengangkat potensi lokal desa dengan hasil analisis sederhana dari data yang dihasilkan	Perangkat desa belum memiliki kemampuan dalam melakukan analisis secara sederhana yang berkaitan dengan potensi lokal desa (ikon khusus desa)	Perangkat desa memiliki kemampuan dalam melakukan analisis secara sederhana yang berkaitan dengan potensi lokal desa (ikon khusus desa)
7	Kurangnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang diperlukan	Masyarakat lebih terbuka dalam memberikan data yang diperlukan	Petugas lapangan belum memiliki teknik <i>probing</i> yang baik	Petugas memiliki teknik <i>probing</i> yang baik
8	Keakuratan data desa yang belum baik	Data desa yang akurat	Petugas lapangan belum memiliki kemampuan dalam memahami konsep dan definisi yang sesuai	Petugas lapangan memiliki kemampuan dalam memahami konsep dan definisi yang sesuai
9	Data NIK yang belum valid berkaitan dengan dana bansos	Data NIK yang valid dan berkaitan	Perangkat desa belum memahami cara mengolah data NIK dengan baik, belum mencakup informasi apakah masyarakat layak atau tidak dengan dana bansos.	Perangkat desa memahami cara mengolah data NIK dengan baik
10	Pemilihan petugas lapangan yang belum tepat	Pemilihan petugas lapangan yang tepat	Belum terdapat kriteria pemilihan petugas lapangan yang tepat	Terdapat kriteria pemilihan petugas lapangan yang tepat

Gap Causes Desa Maduretno

No	Permasalahan	Deskripsi Gap
1	Data yang tidak valid dan independen	Belum terdapat pelatihan perangkat desa (petugas) berkaitan dengan teknik wawancara lapangan yang baik (tata cara pendataan) Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan tata kelola data yang mudah dipahami perangkat desa
2	Perbedaan hasil data dari berbagai sumber yang berbeda	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan konsep dan definisi yang mudah dipahami oleh petugas lapangan
3	Belum terdapat peta kondisi masyarakat desa	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan analisis sederhana dari hasil data yang disajikan
4	Pelayanan kepada masyarakat yang belum mudah	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan cara menyajikan data yang baik dengan tabulasi sederhana
5	Belum dapat melaksanakan prioritas-prioritas penggunaan dana desa dengan baik dalam pengentasan kemiskinan	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan identifikasi indikator strategis pada level desa
6	Belum dapat mengangkat potensi lokal desa	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan analisis sederhana terhadap potensi lokal desa (ikon khusus desa)
7	Kurangnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang diperlukan	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan teknik wawancara <i>probing</i> yang baik
8	Keakuratan data desa yang belum baik	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan konsep dan definisi yang mudah dipahami oleh petugas lapangan
9	Data NIK yang belum valid berkaitan dengan dana bansos	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan pemahaman konsep dan definisi rumah tangga.
10	Pemilihan petugas lapangan yang belum tepat	Belum terdapat kriteria pemilihan petugas lapangan yang tepat

2. The State of The Business Kelurahan Andongsili

No	Permasalahan	Kondisi Ideal	Kompetensi yang dimiliki saat ini	Kompetensi yang harus dimiliki
1	Aplikasi data desa cantik yang belum terintegrasi	Terdapat aplikasi yang terintegrasi antar data	Belum terdapat aplikasi yang terintegrasi	Terdapat aplikasi yang terintegrasi antar data
2	Data kelurahan yang tidak update	Data yang update dan akurat	Aparat pemerintah setempat belum memahami tata cara update data yang baik	Aparat pemerintah setempat memahami tata cara update data yang baik
3	Akses aplikasi data profil desa yang belum bisa diakses	Akses aplikasi data profil desa mudah diakses	Perangkat desa belum memahami tata cara akses aplikasi data profil desa	Perangkat desa memahami tata cara akses aplikasi data profil desa
4	Belum terdapat nara sumber data kelurahan.	Terdapat nara sumber data kelurahan.	Perangkat desa belum ada yang mampu untuk menjadi narasumber data kelurahan.	Perangkat desa mampu untuk menjadi narasumber data kelurahan.
5	Data NIK yang belum valid	Data NIK yang valid berkaitan	Perangkat desa belum memahami cara mengolah data NIK dengan baik	Perangkat desa memahami cara mengolah data NIK dengan baik
6	Keakuratan data desa yang belum baik	Data desa yang akurat	Pemahaman konsep dan definisi petugas yang belum baik	Pemahaman konsep dan definisi petugas yang baik
7	Pembangunan desa yang belum maksimal	Pembangunan desa terlaksana dengan baik, dan tepat	Aparat desa belum memahami indikator-indikator pembangunan desa	Aparat desa memahami indikator-indikator pembangunan desa

Gap Causes Kelurahan Andongsili

No	Permasalahan	Deskripsi Gap
1	Aplikasi data desa cantik yang belum terintegrasi DISDUKCapil	Belum terdapat aplikasi data yang terintegrasi
2	Data kelurahan yang tidak update	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan tata cara akses aplikasi data profil desa
3	Akses aplikasi data profil desa yang belum bisa diakses	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan tata kelola data
4	Belum terdapat nara sumber data kelurahan.	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan teknik komunikasi
5	Data NIK yang belum valid	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan pemahaman konsep dan definisi rumah tangga.
6	Keakuratan data desa yang belum baik	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan konsep dan definisi yang mudah dipahami oleh petugas lapangan
7	Pembangunan desa yang belum maksimal	Belum terdapat pelatihan terkait konsep dan definisi indikator-indikator pembangunan desa (indikator SDGs)

3. The State of The Business Desa Lipursari

No	Permasalahan	Kondisi Ideal	Kompetensi yang dimiliki saat ini	Kompetensi yang harus dimiliki
1	Belum terdapat aplikasi satu data	Terdapat aplikasi yang terintegrasi antar data	Belum terdapat aplikasi yang terintegrasi	Terdapat aplikasi yang terintegrasi antar data
2	Belum terdapat pemahaman akan pentingnya data	Terdapat pemahaman akan pentingnya data	Aparat belum memahami pentingnya data	Aparat desa memahami pentingnya data

Gap Causes Desa Lipursari

No	Permasalahan	Deskripsi Gap
1	Belum terdapat aplikasi satu data	Belum terdapat aplikasi data yang terintegrasi
2	Belum terdapat pemahaman akan pentingnya data	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan pemahaman arti penting data statistik

Sehingga dapat disimpulkan analisis kesenjangan (*gap*) yang terdapat pada tiga desa terpilih secara garis besar

dengan menggunakan pengembangan instrumen Perka BKN Nomor 17 Tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 1. Formulir Analisis Kesenjangan (Gap) Kompetensi

No	Kondisi Ideal	Kompetensi yang dimiliki saat ini	Kompetensi yang seharusnya dimiliki
1	Terciptanya satu data desa yang independen dan valid	Petugas lapangan masih belum menguasai teknik <i>probing</i> yang baik Belum memahami tata kelola data yang baik	Petugas lapangan menguasai teknik <i>probing</i> yang baik Memahami tata kelola data yang baik
2	Hasil data yang sama dari berbagai sumber data	Petugas lapangan masih memiliki pemahaman konsep dan definisi yang berbeda	Petugas lapangan memahami konsep dan definisi dengan baik
3	Terdapat peta kondisi masyarakat desa	Perangkat desa belum dapat melakukan analisis sederhana dari hasil data yang diperoleh	Perangkat desa dapat memetakan kondisi masyarakat desa
4	Pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan akurat	Perangkat desa belum memahami cara menyajikan data (tabulasi sederhana) yang memudahkan dalam pelayanan masyarakat	Perangkat desa memahami cara menyajikan data (tabulasi sederhana) yang memudahkan dalam pelayanan masyarakat
5	Dapat melaksanakan prioritas-prioritas penggunaan dana desa dengan baik dalam pengentasan kemiskinan	Perangkat desa belum memahami indikator-indikator strategis yang dibutuhkan dalam mengukur kemiskinan	Perangkat desa memahami indikator-indikator strategis yang dibutuhkan dalam mengukur kemiskinan
6	Dapat mengangkat potensi lokal desa dengan hasil analisis sederhana dari data yang dihasilkan	Perangkat desa belum memiliki kemampuan dalam melakukan analisis secara sederhana yang berkaitan dengan potensi lokal desa (ikon khusus desa)	Perangkat desa memiliki kemampuan dalam melakukan analisis secara sederhana yang berkaitan dengan potensi lokal desa (ikon khusus desa)
7	Masyarakat lebih terbuka dalam memberikan data yang diperlukan	Petugas lapangan belum memiliki teknik <i>probing</i> yang baik	Petugas memiliki teknik <i>probing</i> yang baik
8	Data desa yang akurat	Petugas lapangan belum memiliki kemampuan dalam memahami konsep dan definisi yang sesuai	Petugas lapangan memiliki kemampuan dalam memahami konsep dan definisi yang sesuai
9	Data NIK yang <i>valid</i> dan berkaitan	Perangkat desa belum memahami cara mengolah data NIK dengan baik, belum mencakup informasi apakah masyarakat layak atau tidak dengan dana bansos.	Perangkat desa memahami cara mengolah data NIK dengan baik
10	Terdapat nara sumber data kelurahan.	Perangkat desa belum ada yang mampu untuk menjadi narsum data kelurahan.	Perangkat desa mampu untuk menjadi narsum data kelurahan.
11	Pembangunan desa terlaksana dengan baik, dan tepat	Aparat desa belum memahami indikator-indikator pembangunan desa	Aparat desa memahami indikator-indikator pembangunan desa
12	Terdapat pemahaman akan pentingnya data	Aparat belum memahami pentingnya data	Aparat desa memahami pentingnya data

Tabel 1 menjabarkan kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa saat ini dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh aparat desa berdasarkan kondisi masing-masing desa sampel. Pemetaan kompetensi dibutuhkan dalam mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa. Selanjutnya dilakukan identifikasi kesenjangan kompetensi yang dikembangkan dari hasil pemetaan kompetensi sehingga dapat dilakukan penentuan jenis pelatihan yang sesuai, dibutuhkan dan tepat sasaran.

Kompetensi yang seharusnya dimiliki dan ideal dimiliki oleh aparat desa

adalah kemampuan dalam teknik komunikasi *probing* yang baik dalam menggali informasi dari masyarakat kelurahan, pemahaman dalam tata kelola data, pemahaman pada konsep definisi variabel-variabel indikator strategis, pemahaman dalam pemetaan kondisi masyarakat kelurahan, kemampuan dalam menyajikan data (tabulasi sederhana), kemampuan dalam analisis sederhana potensi desa, kemampuan narasumber dalam penyampaian informasi data kelurahan, pemahaman akan indikator pembangunan desa dan pentingnya data (tabel 1).

3. Rekomendasi Pelatihan

Tujuan akhir dari Analisis Kebutuhan Pelatihan yaitu mengidentifikasi persyaratan pelatihan dalam memenuhi kebutuhan yang telah di-identifikasi, setelah itu dapat ditentukan mata pelatihan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan (McConnell,

2003). Berdasarkan Formulir Analisis Kesenjangan (*Gap*) Kompetensi pada tabel 1 dapat diperoleh deskripsi kesenjangan (*gap*) kompetensi yang dapat mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan dengan menggunakan pengembangan instrumen Perka BKN Nomor 17 Tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 2 Formulir Penentuan Kebutuhan Pelatihan

No	Permasalahan	Deskripsi Gap	Pelatihan yang Dibutuhkan
1	Data yang tidak valid dan independen	Berkaitan dengan teknik wawancara lapangan yang baik (tata cara pendataan)	Teknik Wawancara, Komunikasi Efektif, Taktik-taktik Komunikasi, Teknik Pengumpulan Informasi, Praktek Teknik Komunikasi, Perubahan <i>Mindset</i>
		Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan tata kelola data yang mudah dipahami perangkat desa	Manajemen Kualitas Data, GSBPM, Pengolahan Data, Tata Kelola Data Desa, <i>Stakeholder mapping</i>
2	Perbedaan hasil data dari berbagai sumber yang berbeda	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan konsep dan definisi yang mudah dipahami oleh petugas lapangan	Konsep dan definisi variabel yang menjadi inventory data strategis desa, Identifikasi Indikator kemiskinan/strategis
3	Belum terdapat peta kondisi masyarakat desa	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan analisis sederhana dari hasil data yang disajikan	Analisis dan Penyajian Data, Konsep Statistik Deskriptif untuk Pemula, Statistik Dasar
4	Pelayanan kepada masyarakat yang belum mudah	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan cara menyajikan data yang baik dengan tabulasi sederhana	Analisis dan Penyajian Data, Konsep Statistik Deskriptif untuk Pemula, Statistik Dasar
5	Belum dapat melaksanakan prioritas-prioritas penggunaan dana desa dengan baik dalam pengentasan kemiskinan	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan identifikasi indikator strategis pada level desa	Konsep dan definisi variabel yang menjadi inventory data strategis desa, Identifikasi Indikator kemiskinan/strategis, Pemanfaatan data untuk pembangunan
6	Belum dapat mengangkat potensi lokal desa	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan analisis sederhana terhadap potensi lokal desa (ikon khusus desa)	Analisis dan Penyajian Data, Pemanfaatan data untuk pembangunan
7	Kurangnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang diperlukan	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan teknik wawancara <i>probing</i> yang baik	Teknik Wawancara, Komunikasi Efektif, Taktik-taktik Komunikasi, Teknik Pengumpulan Informasi, Praktek Teknik Komunikasi
8	Keakuratan data desa yang belum baik	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan konsep dan definisi yang mudah dipahami oleh petugas lapangan	Konsep dan definisi variabel yang menjadi inventory data strategis desa, Identifikasi Indikator kemiskinan/strategis, Pemanfaatan data untuk pembangunan, Ekonomi dan Perdagangan, Pertanian dan Pertambangan.
9	Data NIK yang belum valid berkaitan dengan dana bansos	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan pemahaman konsep dan definisi rumah tangga.	Konsep dan definisi Sosial dan Kependudukan
10	Belum terdapat nara sumber data kelurahan.	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan teknik komunikasi	Komunikasi Publik, Komunikasi Efektif, Taktik-taktik Komunikasi, Teknik Komunikasi, Strategi Perencanaan Komunikasi, Perubahan <i>Mindset</i>
11	Pembangunan desa yang belum maksimal	Belum terdapat pelatihan terkait konsep dan definisi indikator-indikator pembangunan desa (indikator SDGs)	Konsep dan definisi variabel yang menjadi inventory data strategis desa, Identifikasi Indikator kemiskinan/strategis, Indikator SDGs
12	Belum terdapat pemahaman akan pentingnya data	Belum terdapat pelatihan berkaitan dengan pemahaman arti penting data statistik	Pemanfaatan data untuk pembangunan, <i>Stakeholders Mapping</i>

Pada tabel 2 terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh aparat desa sampel adalah data yang belum *valid* dan *independen*, perbedaan

hasil data dari sumber yang berbeda, belum adanya peta kondisi masyarakat desa, belum maksimalnya pelayanan aparat desa kepada masyarakat, belum

dapat melaksanakan prioritas-prioritas penggunaan dana desa dengan baik dalam pengentasan kemiskinan, belum dapat mengangkat potensi lokal desa, kurangnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang diperlukan, keakuratan data desa yang belum baik, data NIK yang belum *valid*, belum terdapat narasumber data kelurahan yang *qualified*, pembangunan desa yang belum maksimal, serta belum terdapat pemahaman akan pentingnya data statistik.

Berdasarkan analisis dari deskripsi *gap* yang ada terdapat rekomendasi mata pelatihan yang secara garis besar berkaitan dengan teknik komunikasi dan *probing* yang dibutuhkan oleh calon pembina desa 100 Desa Cantik yang terdiri dari Teknik Wawancara, Komunikasi Efektif, Taktik-taktik Komunikasi, Teknik Pengumpulan Informasi, Praktek Teknik Komunikasi, Komunikasi Publik, Strategi Perencanaan Komunikasi, dan *Perubahan Mindset*. Selain itu, dibutuhkan juga mata pelatihan yang berkaitan dengan Manajemen Kualitas Data, tahapan *General Statistics Busines Process Model* (GSBPM), Pengolahan Data, Tata Kelola Data Desa, *Stakeholder mapping*, Konsep dan definisi variabel yang menjadi *inventory* data strategis desa, Identifikasi Indikator kemiskinan/strategis, Analisis dan Penyajian Data, Konsep Statistik Deskriptif untuk Pemula, Statistik Dasar, Pemanfaatan Data untuk Pembangunan, Ekonomi dan Perdagangan, Pertanian dan Pertambangan, Sosial dan Kependudukan, serta Indikator SDGs.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa program pelatihan yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan melaksanakan pengelompokan materi pelatihan yang dibagi menjadi dua

tahap agar pelatihan calon pembina 100 Desa Cantik lebih fokus, terarah, tepat sasaran serta dilakukan secara efektif dan efisien. Pada pelatihan tahap pertama dapat mencakup materi pelatihan yang berkaitan dengan teknik komunikasi dan *probing*, sedangkan pelatihan pembina desa cinta statistik tahap kedua lebih difokuskan kepada materi pelatihan yang lebih teknis seperti Manajemen Kualitas Data, GSBPM, Pengolahan Data, Tata Kelola Data Desa, Stakeholder mapping, Konsep dan definisi variabel yang menjadi *inventory* data strategis desa, Identifikasi Indikator kemiskinan/strategis, Analisis dan Penyajian Data, Konsep Statistik Deskriptif untuk Pemula, Statistik Dasar, Pemanfaatan Data untuk Pembangunan, Ekonomi dan Perdagangan, Pertanian dan Pertambangan, Sosial dan Kependudukan, serta Indikator SDGs.

Selain itu, penggunaan teknologi pembelajaran juga sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran. *Learning Management System (LMS)* atau aplikasi pembelajaran berbasis *web* dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangkaian proses pembelajaran yang dilakukan secara daring (*online*). Media pembelajaran statistik *digital* lainnya juga dapat digunakan seperti aplikasi pada *smartphone* dalam perangkat berbasis *android*, yang mencakup materi pembelajaran secara digital, *knowledge management system* dan *shared learning*.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam artikel ini, maka dapat disampaikan saran yaitu perlu adanya pembelajaran praktek teknik komunikasi pada saat pelaksanaan pelatihan calon pembina 100 Desa Cantik agar nantinya para pembina desa dapat menggali apa saja kebutuhan desa yang akan dicapai. Selain itu, dengan adanya praktek pada materi pelatihan teknik komunikasi efektif diharapkan pembina desa dapat memberikan pendampingan dan pengarahan terhadap aparat desa dalam melakukan wawancara responden pada tahap pengumpulan data.

Metode analisis melalui FGD dilakukan pada saat pandemi Covid-19, sehingga dilakukan secara *virtual* melalui *zoom meeting*. Seharusnya pelaksanaan FGD akan lebih efektif jika dilakukan dalam satu ruangan secara *offline* untuk membangun suasana agar penyamaan persepsi dapat lebih mudah dicapai. Akan tetapi, mitigasi resiko yang dilakukan dalam mengatasi perihal tersebut adalah dengan menerapkan teknik-teknik *probing* pada saat diskusi FGD berlangsung. Teknik tersebut diterapkan kepada aparat desa sehingga arah jalannya diskusi tetap terarah dan dapat mendorong aparat desa dalam mengemukakan pendapatnya.

Analisis selanjutnya diperkuat dengan pelaksanaan *Indepth Study* ke desa-desa tertentu, sehingga informasi yang diperoleh dapat digali lebih dalam lagi. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi kepada aparat desa tentang minat dan pengetahuan statistik di desa-desa terpilih. Dengan dilakukan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dan apresiasi aparat desa akan pentingnya data statistik sebagai bagian dari pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Rahma, Y. (2021) *Tingkat Pendidikan Kades di Indonesia Berbeda-beda, Mendagri Support Adanya Pembinaan Aparatur Desa - Pikiran Rakyat Depok*. Available from : <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-091417520/tingkat-pendidikan-kades-di-indonesia-berbeda-beda-mendagri-support-adanya-pembinaan-aparatur-desa>.
- Ferreira, R.R., Abbad, G. da S. and Mourão, L. (2014) Training Needs Analysis at Work. *The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Training, Development, and Performance Improvement*, pp. 32–49.
- Gould, D. et al. (2004) Training needs analysis. A literature review and reappraisal. *International Journal of Nursing Studies*, 41(5), pp. 471–486.
- Kamil, M. (2003) Model-Model Pelatihan. *Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Kurniadi, D. and Irianto, J. (2007) Prinsip Prinsip Dasar Manajemen Pelatihan (Dari Analisis Kebutuhan sampai Evaluasi Program Pelatihan). *Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Manna, R., Singh, A. and Sharma, P. (2016) Does Training Need Analysis Help to Minimize Competency Gap: An Investigation. *AJTD ADMAA Amity Journal of Training and Development*, 1(1), pp. 109–131.
- McConnell, J.H. (2003) *How to Identify Your Organization's Training Needs: A Practical Guide To Needs Analysis*. New York: Amacom.
- Morgan, D.L. (2003) Focus Groups. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129>, 22, pp. 129–152.
- Ngindana, R. and Hermawan, R. (2019) Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kesenjangan Kerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 1(1), pp. 1–11.
- Nursalikah, A. (2019) *60 Persen Aparatur Desa Hanya Lulusan SMA | Republika Online*. Available from : <https://www.republika.co.id/berita/q170j6366/60-persen-aparatur-desa-hanya-lulusan-sma>.
- Pendidikan, P.T. et al. (2021) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Dan Pemahaman Akuntansi Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), [Online] Available from: <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/486> [Accessed 05/12/2021].
- Perka BKN AKD, R.I. (2011) *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara*

*Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Analisis
Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Manajemen Pegawai Negri
Sipil.*

Perpres SDI, R.I. (2019) *Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia.*

Rahmat, Y. (2020) *InfoPublik - Belum
Optimal, BPS Wonosobo Dorong Desa
Aktif Memutakhirkan Data.* Available
from : [https://infopublik.id/kategori/
nusantara/469571/belum-optimal-
bps-wonosobo-dorong-desa-aktif-
memutakhirkan-data.](https://infopublik.id/kategori/nusantara/469571/belum-optimal-bps-wonosobo-dorong-desa-aktif-memutakhirkan-data)

Renstra Pusdiklat BPS, R.I. (2021) *Reviuw
Rencana Strategis Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
periode 2020-2024.*

Santoso, B. (2010) *Skema dan Mekanisme
Pelatihan, Panduan Penyelenggaraan
Pelatihan - Google Play Buku.*
[Online] Yayasan Terumbu Karang
Indonesia (Terangi). Available from
: <https://play.google.com/books/>